

Periodisasi Pengawasan Bibliografi Nasional Indonesia 1946-2022

Niswa Nabila Sri Bintang Alam¹

¹Perpustakaan Nasional RI

niswa.alam@gmail.com

Pendahuluan

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 2007, memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengawasan informasi yang terdapat dalam publikasi-publikasi di Indonesia. Fungsi Perpustakaan Nasional mencakup sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan. Terletak di ibukota negara, Perpustakaan Nasional berfungsi sebagai pusat deposit nasional (Sulistyo-Basuki, 2009).

Peran utama dari Perpustakaan Nasional adalah mengelola, melestarikan, hingga memberdayakan semua publikasi yang dihasilkan di dalam negeri. Dengan kata lain, Perpustakaan Nasional berfungsi sebagai pusat deposit nasional. Karena banyaknya publikasi yang berkaitan dengan Indonesia, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri, maka diperlukan upaya untuk mengidentifikasi karya-karya tersebut sehingga dapat diakses dengan mudah dan dimanfaatkan secara maksimal. Proses pengidentifikasian ini dikenal sebagai pengawasan bibliografi.

Pengawasan Bibliografi di Indonesia

Pengawasan bibliografi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengendalikan sistem pencatatan informasi dari semua jenis karya cetak, rekam, dan bentuk informasi lainnya, baik yang telah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan, dengan tujuan untuk memperkaya pengetahuan. Pengawasan bibliografi nasional adalah suatu proses penting dalam mengumpulkan, mencatat, dan menyediakan informasi mengenai publikasi yang dihasilkan dalam suatu negara. Di Indonesia, pengawasan bibliografi nasional telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak kemerdekaan pada tahun 1945.

Tulisan ini dimaksudkan untuk membuat periodisasi pengawasan bibliografi nasional Indonesia setelah zaman kemerdekaan dari tahun 1946 hingga 2022. Setiap periode akan diidentifikasi dengan peristiwa dan lembaga yang terkait.

Lembaga Pengawas Bibliografi di Indonesia

Di Indonesia, pengawasan bibliografi dilakukan oleh beberapa lembaga dan badan yang memiliki peran krusial dalam

menjaga dan mencatat informasi terkait dengan literatur dan publikasi di negara ini. Salah satu lembaga utama yang bertanggung jawab atas pengawasan bibliografi adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang mulai menjalankan peran ini sejak tahun 1980, sebelumnya dikenal sebagai Kantor Bibliografi Nasional sejak tahun 1953. Perpustakaan Nasional mengkhususkan diri dalam pengawasan monograf dan secara berkala menerbitkan Bibliografi Nasional Indonesia setiap tiga bulan.

Selain Perpustakaan Nasional, PT. Gunung Agung juga berperan dalam pencatatan bibliografi dengan penekanan pada bentuk monograf. Meskipun pada awalnya mereka telah menyelesaikan bibliografi retrospektif periode 1945-1954, sayangnya, ini tidak pernah diterbitkan. Pada tahun 1966, kegiatan pencatatan bibliografi diserahkan kepada Yayasan Idayu, yang kemudian menerbitkan Berita Bibliografi setiap bulan sejak tahun 1955.

Selain itu, PDII-LIPI (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah - LIPI) juga memainkan peran penting dalam pengawasan bibliografi di Indonesia. Fokus perhatian mereka pada indeks artikel majalah ilmiah dan laporan penelitian. Mereka menerbitkan Indeks Majalah Ilmiah (Index of Indonesian Learned Periodicals) sejak tahun 1960 dan indeks retrospektif laporan penelitian dari tahun 1950 hingga 1977. Terakhir, mereka juga mengawasi disertasi melalui penerbitan Katalog Induk Disertasi Indonesia (KIDI), yang terus diperbarui.

Dengan adanya kerja sama antara berbagai lembaga ini, pengawasan bibliografi di Indonesia menjadi lebih terorganisir. Tentu saja hal ini membantu masyarakat akademik serta peneliti untuk mengakses informasi yang relevan dan penting dalam berbagai bidang pengetahuan.

Periode-Periode Signifikan

Perjalanan sejarah perkembangan pengawasan bibliografi di Indonesia memiliki momen yang membuat perubahan signifikan dalam pengelolaan dan pemantauan informasi publikasi selama periode 1946 hingga 2022. Periodisasi ini dapat dibagi menjadi beberapa periode penting:

- Periode 1 (1946-1954):
Setelah masa pendudukan Jepang (1942-1945), Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pada periode awal ini, belum ada lembaga yang secara khusus bertanggung jawab atas pengawasan bibliografi. Namun, perpustakaan dan penerbit lokal berperan penting dalam mencatat dan menyimpan terbitan Indonesia. Peristiwa penting pada tahun 1946 adalah pendirian Perpustakaan Museum Jakarta sebagai tempat penyimpanan koleksi terbitan Indonesia.
- Periode 2 (1955-1966):
Pada tahun 1955, dimulailah periode awal pengawasan bibliografi dengan munculnya majalah "Buku Kita" yang diterbitkan oleh PT. Gunung Agung. Majalah ini menjadi salah satu upaya awal dalam mencatat terbitan

Indonesia secara sistematis. Periode ini berlangsung hingga tahun 1966.

- Periode 3 (1966-1976):
Pada tahun 1966, pengawasan bibliografi mengalami peralihan dengan pencatatan bibliografi yang beralih ke Yayasan Idayu. Ini adalah perubahan penting yang mencerminkan evolusi pengawasan bibliografi di Indonesia. Selama periode ini, Yayasan Idayu menjadi aktor utama dalam memantau dan mencatat terbitan Indonesia.
- Periode 4 (1976-sekarang):
Periode ini menggabungkan "Berita Bibliografi" dengan majalah "Berita Idayu" dan mengembalikan fokus utama pada penyajian daftar terbitan Indonesia terbaru dengan judul "Berita Bibliografi." Majalah ini terus diterbitkan secara teratur dan dikirimkan ke penerbit serta perpustakaan sebagai pertukaran bahan pustaka. Periode ini mencerminkan konsolidasi pengawasan bibliografi di bawah lembaga Yayasan Idayu.

Selain periodisasi di atas, beberapa peristiwa penting lainnya melibatkan lembaga yang terlibat dalam pengawasan bibliografi:

- Pada periode awal (1913-1942)
Otoritas kolonial Belanda mengumpulkan dan mencatat publikasi yang diterbitkan di Hindia Belanda. Katalog bibliografi yang terkenal pada periode ini adalah *Catalogus der Bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten En Wetenschappen*.

- Selama masa pendudukan Jepang (1942-1945)
Pengawasan bibliografi diubah sesuai dengan tujuan militer Jepang, dengan publikasi yang lebih difokuskan pada topik yang mendukung tujuan mereka di Indonesia.
- Setelah kemerdekaan (1945-1966)
Lembaga Bibliografi Nasional yang menjadi bagian dari Perpustakaan Nasional memainkan peran penting dalam pengawasan bibliografi.
- Pada periode Orde Lama (1966-1998)
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, mengelola pengawasan bibliografi dengan tujuan mendukung penelitian dan pengembangan kebudayaan nasional.
- Sejak era reformasi (1998-sekarang)
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengambil peran sentral dalam pengawasan bibliografi di Indonesia. Sistem informasi bibliografi online seperti Katalog Induk Nasional dan Katalog Buku Indonesia menjadi bagian penting dari pengawasan bibliografi modern.

Demikianlah periodisasi dan peristiwa penting dalam pengawasan bibliografi di Indonesia dari tahun 1946 hingga 2022, yang mencerminkan perkembangan sistem perpustakaan dan kebijakan pemerintah terkait informasi dan literatur di negara ini. Dalam era digital ini, pengawasan bibliografi semakin memudahkan akses masyarakat terhadap informasi dan penelitian di Indonesia.

Kesimpulan

Pengawasan bibliografi nasional di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan sepanjang periode 1946-2022. Dengan memahami periodisasi ini, kita dapat menghargai perkembangan dalam pengumpulan dan akses informasi bibliografi, serta mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Upaya terus-menerus untuk meningkatkan pengawasan bibliografi akan mendukung akses pengetahuan yang lebih baik di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Prasetiawan, I. B. (2005). Peranan Bibliografi Nasional Indonesia dan Berita Bibliografi dalam pengawasan bibliografi rujukan di Indonesia [The role of Bibliografi Nasional Indonesia (published by Indonesian National Library) and Berita Bibliografi (published by Idayu Foundation) towards reference bibliographic control in Indonesia]. *Jurnal Visi Pustaka*, 7(2), 25-31.
- Rachmananta, D. (1998). Bibliographic Control in Indonesia: Past, Present, and Future. *LASIE*, 9(4), 27-39.
- Rahayu, R. N., & Tupan, T. (2013). Analisis Bibliografi Nasional Indonesia Periode 2009-2010. *Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, 34(2), 123-145.
- Rahmi, P., Wulandari, P., Nurwati, N., Pangalila, D., & Justicia, S. T. (2020). Pemahaman Pustakawan terhadap Bibliografi Nasional Indonesia. *VISI PUSTAKA*, 22(2).